

**WAJAH AGAMA DI HADAPAN POLITIK IDENTITAS:
REFLEKSI-KRITIS SEJARAH DI/TII DI SULAWESI TENGGARA**

***RELIGION'S FACE BEFORE POLITICS OF IDENTITY:
CRITICAL-REFLECTION OF DI/TII HISTORY IN SOUTHEAST SULAWESI***

Fathul Karimul Khair

Alumni Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Hasanuddin

Email: erikfathul@gmail.com

Naskah diterima tanggal 27 Agustus 2019, Naskah direvisi tanggal 3 September 2019, Naskah disetujui tanggal 2 Oktober 2019

Abstrak

Posisi agama dalam politik identitas belum banyak dibincangkan secara serius oleh para peneliti sosial. Salah satu peristiwa dalam sejarah Indonesia yang dapat dijadikan acuan untuk lebih jelas memandang persoalan itu adalah gerakan DI/TII di Sulawesi. Pimpinan gerakan ini adalah Qahar Muzakkar, seorang pemuda dari Sulawesi Selatan yang turut berjuang selama revolusi Indonesia. Ia berontak karena beberapa tuntutan soal ketentaraan ditolak oleh TNI, lalu pada tahun 1953 menjadikan Islam sebagai landasan pemberontakannya. Makalah ini menggunakan kerangka pemikiran Francis Fukuyama soal politik identitas untuk menginvestigasi langkah praktis politik Qahar Muzakkar. Langkah taktis Qahar itu kemudian berimplikasi pada corak gerakan mereka di Sulawesi Tenggara, suatu daerah periferi dari Sulawesi Selatan ketika pemberontakan tersebut dideklarasikan. Berangkat dari studi arsip dan literatur dalam metode sejarah, makalah ini memperlihatkan ciri-ciri *megalothymia* dalam kelompok Qahar. Ciri yang demikian nampak ketika kelompoknya menggunakan agama baik untuk meneror maupun menarik simpati massa di Sulawesi Tenggara. Terdapat pula gambaran mengenai posisi ulama lokal Sulawesi Tenggara di bawah tekanan arus politik penuh darah itu. Gerakan DI/TII di Sulawesi Tenggara adalah satu contoh konflik politik identitas dalam sejarah Indonesia. Telaah kritis pada episode sejarah ini akan memperlihatkan bagaimana posisi agama sebagai wahana sekaligus korban dari suatu ambisi politik.

kata kunci: agama, politik, di/tii, *megalothymia*, qahar

Abstract

The religion position in politic of identity has not been much discussed seriously by social researchers. One event in Indonesian history that can be used as a reference to more clearly see that issue is DI/TII movement in Sulawesi. The leader of that movement is Qahar Muzakkar, a young man from South Sulawesi who fought during Indonesia Revolution. He rebelled because some of his demands about army were rejected by TNI, then in 1953 he choose Islam as a foundation of his rebellion. This paper uses Francis Fukuyama's frame of thought about politic of identity to investigate Qahar Muzakkar's political practic steps. Qahar tactical move then had an implication for the style of their movement in Southeast Sulawesi, a peripheral area of South Sulawesi when the rebellion was declared. With using archival and literature studies in historical methods, this paper found megalothymia character in Qahar Muzakkar's group. Such a characteristic is evident when his group uses religion both to terrorize and attract masses sympathy. This paper also capture the position of Southeast Sulawesi local ulama under that bloody political stream pressure. DI/TII movement in Southeast Sulawesi is an example of an politic of identity conflict in Indonesian history. The critical study of this historical eposides will show how religion take a position as a tools as well as victim of some political ambition.

Keywords: religion, politic, DI/TII, *megalothymia*, Qahar

PENDAHULUAN

Sejarah Indonesia periode 1950-an nampaknya merupakan sebuah tema kajian kurang didalami oleh peneliti sosial di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah para sejarawan. Padahal periode ini merupakan satu episode penting sejarah terbentuknya wajah negara pasca revolusi melelahkan yang menghancurkan tatanan masyarakat lama (Sita van Bemmelen & Remco Raben, 2011: 1). Setelah pengakuan kedaulatan dicapai pada akhir 1949, masalah yang kemudian mengemuka adalah pertikaian internal dalam negeri.

Pemberontakan terhadap Jakarta sebagai pusat pemerintahan RI meletus di beberapa tempat, salah satunya di Sulawesi. Pertentangan antara kelompok Qahar dengan pihak Republik menggelora di sepanjang tahun 1950-an. Penyebabnya adalah tuntutan Qahar soal ketentaraan yang tak diloloskan pihak TNI. Dalam menangani pemberontakan itu, Republik melakukan tawar-menawar dengan kelompok Qahar yang ternyata tidak begitu solid. Sampai tahun 1953, gerakan Qahar kian compang-camping akibat taktik pemerintah yang menghubungkan satuan-satuan kelompok di bawah Qahar secara terpisah.

Dalam keadaan itu, Qahar mencari satu landasan kuat untuk memperkokoh kembali pasukannya. 7 Agustus 1953, Qahar mendeklarasikan gerakannya sebagai bagian dari DI/TII Jawa Barat dan Aceh di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Satu langkah yang berimplikasi pada konstelasi konflik antara kelompoknya dengan Republik. Jika sebelumnya tuntutan terhadap Republik didasarkan pada ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan dalam ranah militer, akibat deklarasi 7 Agustus itu, pemberontakan mereka diterjemahkan menjadi suatu upaya untuk mendukung ideologi dan pemerintahan lain di wilayah Republik yang baru berdiri.

Sejak terbitnya buku Barbara Sillars Harvey (1989) berjudul *Pemberontakan Kahar Muzakkar dari Tradisi ke DI/TII* tentang gerakan Qahar di Sulawesi Selatan itu, penelitian-penelitian turunan juga turut bermunculan, baik itu berupa makalah, jurnal, skripsi, ataupun tesis. Banyak dari karya-karya itu sekadar melihat aspek sejarah gerakan

Qahar Muzakkar melalui persepektif sosiologi tentang 'banditisme' dan 'keresahan sosial'. Hasilnya merupakan gambaran mengesankan tentang menjamurnya kelompok perampok akibat ketidakstabilan keamanan dan lemahnya pemerintah, bagaimana masyarakat dibuat gelisah akibat merasa nyawa mereka terancam, juga gambaran-gambaran terpisah mengenai kontak senjata antara kelompok Qahar dengan Republik di beberapa tempat.

Akan tetapi, apa yang absen dari karya-karya itu adalah analisis paling mendasar dari motivasi dan taktik Qahar dalam mengambil keputusan untuk bergerak, khususnya tinjauan psikologis kenapa ia memilih Islam dan menggunakannya tidak hanya untuk mengukuhkan kembali solidaritas kelompoknya, tetapi juga untuk menarik simpati rakyat. Maka lahirlah karya penting lain yang selangkah cukup dekat melihat gejala psikologi dalam peristiwa ini, ialah tulisan Anhar Gonggong (1992) berjudul *Abdul Qahhar Mudzakkar dari Patriot hingga Pemberontak*. Dalam karya itu, Anhar Gonggong coba menawarkan satu kerangka berpikir lebih jauh tentang alasan pemberontakan Qahar. Bahwa gerakan itu tak hanya dilandasi oleh kekecewaan atas tuntutan tak terkabulkan soal tentara, melainkan dimotori pula alasan budaya Bugis-Makassar *siri' na pesse*, daerah asal Qahar Muzakkar (Anhar Gonggong, 1992: 223-224).

Kendati demikian, penjelasan Anhar Gonggong nampak mengandung bias yang membenarkan pemberontakan Qahar. Anhar Gonggong ingin mengatakan bahwa Qahar dan pengikutnya wajar memberontak lantaran mereka berasal dari Bugis-Makassar, suatu wilayah yang masyarakatnya dikonstruksi oleh perasaan solidaritas kuat (*pesse'pacce*) serta tingginya harga diri dan rasa malu (*siri'*). Qahar pernah diusir dari Luwu akibat persekutuan Jepang dengan segelintir bangsawan di sana yang menuduh Qahar mencuri emas di tempatnya bekerja. Ia dijatuhi hukum adat *ri-paoppangi tana*, diusir dari tanah Luwu dan disumpahi akan mati jika menjejalkan kembali kakinya di sana.

Penghukuman itu, telah menodai *siri'* Qahar Muzakkar. Maka, setelah menjadi pahlawan selama revolusi, motif Qahar

melayangkan tuntutan pada TNI dipandang Anhar Gonggong sebagai satu keputusan sederhana untuk membentuk kelompok tentara di mana ia akan bertindak selaku pimpinan. Hanya dengan cara demikianlah, menurut Anhar Gonggong, Qahar dapat memulihkan *siri'*-nya.

Kesimpulan ini memang menyajikan perspektif baru dalam memandang persoalan Qahar, tetapi pandangan tersebut dapat menjadi fatal karena mengandung pembenaran halus atas semua tindakan pasukan Qahar di medan tempur mereka lantaran hendak menuntaskan satu takdir yang digariskan adat. Akibatnya, tak ada refleksi kritis atas peristiwa tersebut. Sebagaimana sampai hari ini tak ada yang hendak meneropong persoalan tersebut sebagai gejala politik identitas di Sulawesi untuk kemudian direfleksikan dalam melihat fenomena politik praktis hari-hari ini.

Tujuan dari penulisan ini adalah menjelaskan pergerakan kelompok Qahar di Sulawesi Tenggara sebagai satu contoh pergolakan politik identitas dalam sejarah Republik Indonesia. Untuk itu, masalah yang hendak dijelaskan dalam tulisan ini adalah (1) menelusuri akar-akar politik identitas, (2) proses perubahan corak pemberontakan Qahar yang awalnya meminta pengakuan dari TNI menjadi suatu upaya mendirikan negara baru sebagai bentuk politik identitas, (3) pergerakan kelompok Qahar Muzakkar di Sulawesi Tenggara.

Berlandaskan beberapa permasalahan yang dikemukakan di atas maka tulisan ini terlebih dahulu menjelaskan secara singkat bagaimana akar politik identitas. Untuk itu, penulis memilih kajian Francis Fukuyama soal politik identitas untuk memahami lebih dekat gerakan Qahar Muzakkar di Sulawesi Tenggara. Setelah membahas politik identitas, karya ini akan segera masuk pada pembahasan perjalanan Qahar sejak masa pembentukan BKI dan pemberontakan akibat tuntutan mengenai Divisi Hasanuddin XIV, serta langkah praktis Qahar ketika mendeklarasikan pemberontakannya sebagai bagian dari DI/TII Kartosuwiryo. Begitu langkah-langkah Qahar tersebut telah dapat dipahami, penjelasan beralih pada persoalan bagaimana kelompok

mereka bergerak di Sulawesi Tenggara: mengancam sekaligus menarik simpati warga menggunakan dalil-dalil agama, menangkap dan menggunakan para ulama lokal, untuk sampai pada kesimpulan bahwa gerakan Qahar Muzakkar tidak murni memperjuangkan agama, tetapi menungganginya.

TINJAUAN PUSTAKA

Selain karya Anhar Gonggong (1992) berjudul *Abdul Qahhar Mudzakkar dari Patriot hingga Pemberontak*, karya lain yang menjadi rujukan utama tulisan ini adalah tulisan Barbara Sillars Harvey yang berjudul *Pemberontakan Kahar Muzakkar dari Tradisi ke DI/TII*. Tulisan Barbara tersebut telah menyajikan penjelasan komprehensif mengenai sejarah pemberontakan Qahar Muzakkar ditinjau dari aspek-aspek politik nasional tentang ketentaraan. Lebih dari itu, Barbara juga menganalisis latar belakang praktis dari pilihan Qahar atas Islam sebagai landasan ideologi pemberontakannya.

Buku lain yang menyajikan penjelasan tentang komponen-komponen pembentuk militer adalah karya Coen Husain Pontoh (2005) berjudul *Menentang Mitos Tentara Rakyat*. Dari karya inilah kita dapat memahami politik ketentaraan di sekitar pilihan-pilihan praktis Qahar. Di dalamnya dijelaskan bahwa terdapat tiga komponen utama pembentuk tentara, yakni para perwira dan mantan serdadu KNIL dari masa Hindia Belanda, bekas tentara PETA bentukan Jepang, dan laskar rakyat yang lahir selama masa revolusi 1945-1949.

Ketiga kelompok ini terlibat dalam persaingan pada awal-awal pembentukan tentara. ketiganya membawa ideologi dan pandangan tersendiri terkait militer, suatu hal yang sangat mempengaruhi posisi mereka dalam badan ketentaraan yang dibentuk ketika Indonesia baru merdeka.

Untuk menjelaskan akar politik identitas, tulisan Francis Fukuyama (2018) berjudul *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment* menyediakan penjelasan mendalam mengenai lahirnya politik identitas. Buku ini tidak hanya berisi

tinjauan teoritis, tetapi juga memuat penjelasan filosofis mengenai kemunculan politik identitas pada masyarakat. Terkait hal itu pula, dalam karyanya ini, Fukuyama memperlihatkan bagaimana politik identitas memperlihatkan cara-cara berpolitik kontradiktif bagi mereka yang menggunakan politik identitas.

Skripsi Gazaluddin (1994) berjudul *Gerakan DI/TII di Muna dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat 1953-1959*, juga merupakan satu karya ilmiah penting yang dapat dijadikan rujukan untuk memahami pergolakan politik dan masyarakat di satu wilayah di Sulawesi Tenggara pada masa DI/TII.

Beberapa sumber arsip yang digunakan Gazaluddin itu antara lain adalah Arsip Prov. Sulawesi 1950-1960 bernomor registrasi 275, 323, dan 330. Data-data tersebut berisi laporan keamanan di wilayah Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 1950-1960. Di dalamnya banyak terdapat laporan mengenai aktifitas gerombolan yang membawa ideologi DI/TII di wilayah tersebut, utamanya dalam kurun 1950-1955. Penulis menggunakan data-data ini pula untuk kemudian dibaca dengan kerangka pemikiran yang dikemukakan Francis Fukuyama mengenai politik identitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada metode sejarah yang menggunakan arsip dan literatur pendukung. Studi arsip itu dilakukan di Kantor Arsip Sulawesi Selatan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, sejak Februari sampai Mei 2018. Arsip-arsip yang digunakan antara lain adalah Arsip Provinsi 1950-1960 nomor registrasi 275, 323, dan 330 tentang keamanan di Sulawesi Tenggara terkait gerakan gerombolan dan DI/TII. Arsip-arsip ini kemudian diinterpretasi untuk memperoleh kembali gambaran mengenai peristiwa di Sulawesi Tenggara pada periode tersebut. Hasil interpretasi itu, lebih menemukan keandalannya jika dipandang menggunakan kerangka berpikir Francis Fukuyama soal politik identitas.

PEMBAHASAN

Akar Politik Identitas

Dalam karyanya berjudul 'Identity: The Demand for Dignity and The Politic of Resentment', Francis Fukuyama (2018) menyatakan bahwa kebutuhan manusia dapat dipilah ke dalam dua bagian. Pertama adalah kebutuhan eksternal berupa sandang, pangan, dan papan, dan kedua ialah kebutuhan internal berupa 'dikenali dan diakui nilai dan martabat seseorang'. Dalam pembagian ini, kita dapat melihat kebutuhan pertama mesti dipenuhi untuk menjamin kelangsungan manusia secara fisik untuk tetap hidup sebagaimana manusia, sedang yang kedua adalah kebutuhan yang mesti dipenuhi seseorang untuk dapat memberikan isi berupa nilai demi menghayati kehidupannya.

Dua kebutuhan itu dapat dipenuhi oleh manusia dengan mengandalkan tiga bagian dari jiwa mereka. Untuk kebutuhan pertama, Fukuyama menyatakan, dalam jiwa manusia sebagai makhluk rasional terdapat bagian yang menghasratkan sesuatu (*desiring part*) dan dibantu oleh bagian lain yang berfungsi mengalkulasi hasrat itu (*calculating part*). Sementara kebutuhan kedua mengenai pengenalan dan pengakuan nilai atau harga dan martabat seseorang itu duduk pada bagian jiwa yang ketiga, Fukuyama menyebutnya sebagai *thymos* (Francis Fukuyama, 2018: 24).

Thymos adalah bagian dasar dari jiwa manusia yang sangat membutuhkan suatu pengakuan. Pelanggaran dan pengakuan pada seseorang akan sangat mempengaruhi bagaimana seseorang akan memandang posisinya dalam masyarakat. Jika seseorang tidak diakui dan dianggap tidak bermartabat dalam lingkungannya maka *thymos*-nya telah dilanggar, dan itu akan menghasilkan amarah, sebaliknya, jika seseorang diakui nilai dan martabatnya, maka ia akan mendapatkan rasa bangga. Dalam bahasa Fukuyama, *thymos* mengharapkan *isothymia*, keadaan di mana ia dikenal dan diakui setara dengan anggota masyarakat lain.

Berdasar penjelasan itu, penempatan *thymos* seseorang sangat ditentukan, pertamanya oleh orang itu sendiri, lalu oleh publik (Francis Fukuyama, 2018: 17). Beberapa

kondisi yang sangat menentukan bagaimana *thymos* ditempatkan adalah apakah individu tersebut mengenali dirinya sendiri atau tidak. Kedua, jika ia mengenali dirinya sendiri, apakah publik juga mengenalinya dengan pandangan demikian. Ketiga, jika individu tidak mengenali dirinya, dan publik juga sama-sama tidak mengenalinya.

Ketidakkennenalan seseorang pada dirinya sendiri oleh masyarakat dapat membuat seseorang merasa dianggap rendah atau tidak setara dengan masyarakat. Kondisi ini adalah pelanggaran terhadap *isothymia* yang selalu diinginkan oleh tiap *thymos* seseorang. Jika demikian, orang tersebut akan terus berusaha untuk kembali mencapai posisi di mana ia kembali setara dengan masyarakat atau *isothymia* kembali. Namun, atas dasar trauma sebab merasa pernah telah dipinggirkan dan direndahkan, upaya mencari posisi *isothymia* itu dapat dengan mudah tergelincir pada *megalothymia* (Francis Fukuyama, 2018: 26). Suatu keadaan di mana seseorang ingin dikenali dan diakui sebagai yang superior dalam masyarakatnya. Ciri *megalothymia* ialah selalu ingin terlihat mengambil risiko besar, mengharapkan suatu perjuangan bersifat monumental yang biasanya dapat diperoleh dalam medan perang, mencari efek-efek besar dari tiap tindakannya, sebab semua itu akan membuatnya dikenal sebagai superior dari yang lain.

Bentuk paling mutakhir upaya mereka yang mencari pengakuan itu adalah terbentuknya suatu politik identitas yang mengandalkan politik kebencian terhadap kelompok yang dianggap pernah merendahkan *thymos* mereka. Dalam banyak kasus, pemimpin politik kelompok itu akan memobilisasi kelompoknya dalam lingkaran persepsi bahwa harga diri atau martabat kelompok mereka telah dihinakan, diabaikan, dan diabaikan (Francis Fukuyama, 2018: 124). Demikianlah mengapa kemudian politik identitas selalu diwarnai ujaran-ujaran kebencian dan amarah yang ditujukan pada kelompok tertentu.

Politik identitas dalam kasus pergerakan kelompok Qahar Muzakkar di Sulawesi Tenggara menampilkan citra

megalothymia tersebut, baik dalam diri Qahar maupun kelompoknya. Namun fenomena itu tidaklah berdiri sendiri, sebab Qahar dan anak buahnya telah memandang diri Qahar sendiri sebagai seorang pemimpin para pejuang di Sulawesi Selatan dan Tenggara. Ia dan kelompoknya merasa pantas mendapatkan pengakuan yang setara dengan para pejuang lain untuk diakui sebagai bagian dari TNI, namun para petinggi TNI sebagai pihak yang memegang legitimasi untuk memberikan pengakuan publik itu tidak memberikannya karena berbagai alasan dan pertimbangan mereka sendiri. Bagaimana kemudian hal itu terjadi, akan kita bicarakan pada bagian selanjutnya.

Yang Terambil dari Qahar

Abdul Qahhar Muzdzakkar lahir di Lanipa, sebuah kampung di distrik Ponrang, Luwu, pada 24 Maret 1921. Ia berasal dari golongan biasa yang merdeka, atau dalam istilah lokal disebut *To-Maradeka*. Ayahnya, seorang pedagang dan memiliki sawah dan ladang yang memadai. Tamat Sekolah Rakyat, Qahar disuruh ayahnya merantau ke Jawa guna melanjutkan sekolah. Di sana ia memasuki sekolah Muallimin yang dikelola oleh Muhammadiyah. Dalam perantauannya itu Qahar terpikat seorang gadis Solo dan mereka menikah.

Qahar tidak sempat menamatkan pendidikannya di Sekolah Muallimin itu. Bersama istrinya, ia kembali ke Luwu dan bergiat di organisasi kepanduan yang berafiliasi dengan Muhammadiyah, Hizbul Wathan. Bersamaan dengan masuknya Jepang, ia bekerja sebagai seorang pegawai di kantor *Nihon Dohopo* di Makassar. Namun, nampaknya ia bukan pegawai yang patuh. Ia juga menentang sistem feodal di Sulawesi Selatan dan menganjurkan dihapuskannya aristokrat. Sebuah tindakan yang membuatnya dijatuhi hukum adat *ripaoppangi-tanah* karena dianggap telah menghina raja dan kerabatnya, ia diusir dari kampung dan akan dihancurkan Tuhan jika berani menginjakkan kembali kakinya di tanah Luwu (Barbara S. Harvey, 1989: 146).

Qahar kembali ke Solo, kampung halaman istrinya. Di sana ia mendirikan perusahaan niaga bernama 'Usaha Semangat Muda'. Dari bisnis niaga itu, ia mengontak teman-teman sekampungnya di Jakarta dan mendirikan perusahaan bernama 'Toko Luwu'. Ia dan teman-temannya itu, di dalamnya termasuk seorang yang nantinya menjadi tangan kanan Qahar bernama Saleh Sahban, sering bertemu di toko itu. Namun mereka tidak hanya membicarakan urusan niaga di sana, mereka juga coba mengatur organisasi perlawanan terhadap Belanda pada masa awal revolusi.

Setelah revolusi pecah menyusul proklamasi 17 Agustus 1945, Qahar mendirikan Gerakan Pemuda Indonesia Sulawesi (Gepis) yang kemudian menjadi Angkatan Pemuda Indonesia Sulawesi (APIS). Organisasi ini kemudian meleburkan diri ke dalam KRIS atau Kebaktian Rakjat Indonesia Sulawesi, suatu organisasi pergerakan yang dibentuk untuk seluruh pemuda asal Sulawesi di Jawa di mana Qahar adalah salah seorang pendirinya. Dalam KRIS ia dipercaya sebagai sekretaris I. Sayang sekali keutuhan KRIS tidak mampu dipertahankan akibat pertentangan antara anggotanya, khususnya dengan pengurus yang berasal dari Manado-Minahasa (Anhar Gonggong, 1992: 99-100).

Keluar dari KRIS, Qahar bertemu Kolonel Zulkifli Lubis dari Markas Besar Tentara. Mereka membicarakan kemungkinan untuk membebaskan tahanan di Nusakambangan untuk kemudian diberi pelatihan singkat dan dijadikan prajurit. Begitu Kolonel Zulkifli Lubis yang mewakili Markas Besar Tentara menyetujui rencana itu, Qahar melaksanakan rencananya. Dari Nusakambangan, ia berhasil membebaskan sekitar 800 tahanan yang mayoritas orang Bugis-Makassar di sana pada akhir Desember 1945 (Anhar Gonggong, 1992: 100).

Para bekas tahanan itu kemudian dibawa ke Yogyakarta dan dilatih secara militer di daerah Pingit. Setelah itu, mereka dinamakan sebagai BKI atau Barisan Kemajuan Indonesia dan kemudian menjadi pasukan inti Qahar dalam revolusi. Ketika Kolonel Zulkifli Lubis, yang merestui Qahar membebaskan mereka oleh Qahar, diangkat

sebagai kepala Badan Penjelidik Khusus (BPC), BKI kemudian berada di bawah BPC sebagai pasukan penggempur Penjelidik Militer Khusus (PMC) (Barbara S. Harvey, 1989: 140) dan selanjutnya diperbantukan ke Markas Besar Tentara (Anhar Gonggong, 1992: 101).

Akhir Desember 1945, pada momen yang sama, beberapa delegasi pemuda dari Sulawesi tiba di Jawa. Dua orang di antara delegasi itu adalah Andi Matalatta dan Saleh Lahade. Mereka bertemu Presiden Soekarno di Yogyakarta pada 12 Januari 1946 untuk mengabarkan suasana Revolusi di Sulawesi Selatan. Soekarno meminta kedua orang itu untuk lebih lanjut bicara dengan Sjahrir selaku Perdana Menteri dan Panglima Besar Jendral Sudirman. Dari hasil pembicaraan itu, mereka diberi beberapa bantuan dan kuasa untuk membentuk divisi Tentara Republik Indonesia (TRI) di Sulawesi, atau biasa disebut Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi (TRI-PS).

Ketika Andi Matalatta dan Saleh Lahade berusaha mencari orang untuk mewujudkan pembentukan TRI-PS, mereka menemui kenyataan bahwa hanya BKI di bawah Qahar Mudzakkar sajalah yang paling mungkin untuk diajak bergabung. Setelah Qahar melepaskan hubungannya –atau dalam hal ini adalah garis koordinasinya dengan Kolonel Zulkifli Lubis, dan menyatakan siap membantu pembentukan TRI-PS, ia dijanjikan akan menjadi komandan pasukan tersebut (Barbara S. Harvey, 1989: 141). Itu diwujudkan pada 24 April 1946, Qahar diangkat sebagai komandan, Andi Matalatta menjadi wakil, dan Kepala Stafnya dipegang oleh Saleh Lahade.

Kini Qahar tidak lagi berada di bawah garis komando Kolonel Zulkifli Lubis. Namun, selain sebagai komandan TRI-PS yang baru terbentuk, Qahar juga menjabat sebagai staf di Biro Perjuangan di bawah kendali langsung Menteri Pertahanan yang saat itu dijabat oleh Amir Sjarifuddin dari PKI. Ini menunjukkan bahwa Qahar memiliki riwayat dekat dengan PKI. Olehnya, ketika pasukan TRI-PS menyelesaikan latihan singkatnya dan siap kembali ke Sulawesi, hanya Andi Matalatta dan Saleh Lahade yang

ikut kembali, Qahar yang tetap diakui sebagai komandan memilih tinggal dan menjalankan kewajiban di Biro Perjuangan.

Di Sulawesi Selatan, orang-orang TRI-PS yang berhasil sampai dengan selamat berkumpul di Patjekke, sebuah desa di Barru. Pada 21 Januari 1947, mereka melakukan semacam konferensi untuk membentuk pasukan. Namun, perlawanan mereka di Sulawesi mengalami kekalahan. Beberapa memilih tinggal di Sulawesi, banyak juga yang memutuskan kembali ke Jawa guna melanjutkan perjuangan di sana.

Sayang sekali, pada tahun 1948, dalam pertentangan internal di kubu pemerintah RI soal ketentaraan, ide-ide PKI mengenai tentara rakyat kalah oleh ide-ide reorganisasi tentara demi profesionalisasi prajurit dari petinggi militer di Markas Besar Angkatan Darat (Coen Husain Pontoh, 2005: 74). Hasilnya, Biro Perjuangan yang juga nanti dikenal dengan TNI-Masyarakat dihapuskan. Tentu, bersamaan dengan itu Qahar kehilangan posisinya sebagai staf di badan tersebut. Kini Qahar hanya memiliki status sebagai komandan TRI-PS.

Langkah lain dari kebijakan reorganisasi Angkatan Darat itu adalah menggabungkan satuan-satuan dari orang-orang dari luar Republik (Republik pada masa itu hanya meliputi Jawa dan Sumatera) ke dalam kesatuan Kesatrian Reserve-X (KRU-X). TRI-PS yang baru kembali ke Jawa setelah kalah di Sulawesi, KRIS, ALRI Divisi VI termasuk pasukan-pasukan terkait yang dimasukkan ke dalam KRU-X. KRU-X dimasukkan ke dalam TNI sebagai Brigade XVI (Barbara, 1989: 147).

Markas Besar Angkatan Darat menunjuk Letnan Kolonel Lembong, seorang Manado sebagai komandan pasukan. Penunjukan itu mendapat penolakan dari pasukan Qahar yang juga bergabung dalam Brigade XVI, mereka hanya menghendaki dipimpin oleh Qahar. Penolakan itu berakhir dengan penculikan Letkol Lembong dan stafnya oleh Qahar dan pasukannya, namun dibebaskan setelah Presiden Soekarno turut mengintervensi. Akibat dari penculikan itu, Letkol ditugaskan di Markas Besar Angkatan Darat. Yang menggantikan posisinya sebagai

komandan di Brigade XVI adalah Warrouw, Qahar sebagai wakil komandan, dan Ventje Sumual menjadi Kepala Staf.

Dalam perkembangannya, garis komando di Brigade XVI tidak berjalan lancar akibat pertempuran yang pecah bersamaan di beberapa tempat. Pada masa itu, Qahar mengutus Saleh Sahban untuk kembali ke Sulawesi guna mengontak para gerilyawan dan kembali mengobarkan perlawanan di Sulawesi yang sempat meredup pasca kekalahan TRI-PS di sana. Oleh upaya itu, Qahar diperintahkan oleh Kolonel Bambang Supeno, Kepala Staf Teritorial Jawa untuk membentuk Komando Grup Seberang (KGS) untuk mempersiapkan kekuatan teritorial dengan mengoordinasikan kegiatan gerilya di Kalimantan dan Indonesia bagian Timur.

Memasuki tahun 1950, setelah kedaulatan Indonesia diakui, Brigade XVI dibubarkan. Satuan-satuan yang menjadi dasar pembentukannya dipecah dan dimasukkan ke dalam satuan lain. 800 orang dimasukkan ke dalam APRIS sebagai satu batalyon di bawah komando Andi Matalatta sebab ia berjasa dalam suatu pertempuran di Yogya. 300-400 orang ditugaskan ke dalam CPM dan dikirim ke Kalimantan, 200 orang diberi tugas di Markas Besar Angkatan Darat. Qahar, akibat peristiwa penculikan Lembong, membuat orang-orang para petinggi militer menganggapnya sebagai orang yang sulit diatur dan harus ditangani hati-hati.

Kini satu-satunya jabatan di tangan Qahar adalah komandan KGS. Saleh Sahban, orang yang pernah ia utus untuk mengonsolidasikan kekuatan gerilyawan di Sulawesi Selatan berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga mampu membentuk satu konferensi di Maros pada 1950. Para gerilyawan di Sulawesi Selatan kemudian bersepakat untuk bersatu ke dalam Kesatuan Gerilja Sulawesi Selatan (KGSS). Dari konferensi itu, mereka mengusulkan untuk kepada pemerintah agar mereka diberi pengakuan sebagai TNI Divisi Hasanuddin, di bawah komando Letnan Kolonel Qahar Mudzakkar.

Dasar untuk usul ini tidak hanya bahwa pembentukan mereka menjadi batalyon

disetujui oleh Komando Grup seberang, tetapi bahwa mereka sebelumnya telah dilantik sebagai anggota Divisi Hasanuddin di Patjেকে pada bulan Januari 1947 atas perintah Panglima Besar Sudirman. Tetapi hal itu ditolak sebab dalam kebijakan militer, satuan-satuan tidak dapat diterima secara keseluruhan. Sebab revolusi telah selesai, mereka yang hendak jadi prajurit tidak lagi cukup hanya dengan bersedia berjuang saja, standar pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kesegaran jasmani, dan sebagainya harus diterapkan dalam menyaring mereka yang hendak masuk tentara (Barbara, 1989: 162).

Pada tanggal 18 atau 22 Juni 1950, Qahar tiba di Makassar membawa surat-surat pemberhentiannya. Tanggal 1 Juli 1950, ia menemui Kawilarang dan sekali lagi mengajukan permohonan agar ia dan kelompok KGSS-nya dijadikan Brigade atau Resimen Hasanuddin dari TNI, dengan ia sendiri sebagai komandannya. Permohonan ini ditolak.

Saat itu juga, Qahar mencopot dan melemparkan tanda pangkatnya ke atas meja di depan Kawilarang. Mereka menolak reorganisasi dan rasionalisasi yang dijalankan kabinet Hatta, sebab kebijakan yang berusaha ‘mengalihkan tenaga produktif mereka ke arah pekerjaan-pekerjaan yang akan dikelola oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda’ itu mereka nilai tidak lain sebagai upaya pencabutan prestise sebagai tentara yang pernah berjuang dan berkorban untuk revolusi. Dari sana Qahar kemudian bergabung dengan pasukan gerilya di Enrekang. Menjelang 5 Juli 1950, semua satuan KGSS ikut mengundurkan diri masuk ke hutan dan tindakan ini diikuti oleh satuan-satuan laskar lain. Kawilarang merespon dengan mengeluarkan keputusan untuk membubarkan KGSS dan laskar-laskar rakyat lain yang tidak termasuk ke dalam APRIS.

Menentukan Identitas

Setelah Qahar melepaskan tanda pangkat di hadapan Kawilarang dan memilih masuk hutan, pengikut-pengikutnya, termasuk di wilayah Sulawesi Tenggara, lekas mencontohi sikap itu. pemuda-pemuda

bersenjata yang berasal dari wilayah itu memutuskan menarik diri ke hutan untuk bergerilya di sana. Segera sesudahnya, Pemerintah Daerah Kolaka Utara menjadi vakum sebab para gerilyawan dengan cepat menduduki Patampanua, suatu kota penting di daerah tersebut (Fathul, 2019: 57-58). Kevakuman anasir pemerintahan Kolaka mengakibatkan merebaknya perampokan dan pembunuhan yang tidak jelas siapa pelakunya di beberapa kampung.

Namun, konstelasi pemberontakan mulai berubah seiring dengan taktik Kolonel Gatot Subroto yang baru saja menggantikan Kawilarang sebagai komandan TT-VII. Gatot Subroto menerapkan semacam taktik tawar-menawar secara langsung dengan komandan satuan-satuan gerilyawan KGSS secara terpisah. Dalam tawar-menawar itu, Gatot Subroto mengirimkan para komandan batalyon tersebut bukti-bukti bahwa Qahar telah bersurat dengan Kartosoewiryo di Jawa Barat tentang kemungkinan diangkatnya Qahar sebagai panglima Divisi IV Tentara Islam Indonesia (TII). Selain itu, mereka yang menyerahkan diri tidak akan dikenakan hukuman. Gubernur dan partai-partai politik setempat pun mengambil peran dengan mengimbau para gerilyawan untuk mematuhi kemauan Angkatan Darat dan Pemerintah untuk menghimpun semua pejuang sejati ke dalam Angkatan Darat (Barbara, 1989: 191-192). Taktik Gatot Subroto itu disebut ‘Uitholling’.

Dampak dari langkah taktis Gatot Subroto itu sangat besar. Solidaritas kelompok Qahar mulai pecah ketika itu. Para komandan gerilyawan yang tidak begitu dekat dengan Qahar memutuskan menerima tawaran TNI. Sedang yang lebih dekat dengannya mempersoalkan kegiatan surat-menyurat Qahar dengan Kartosoewiryo dengan alasan ideologis, apalagi dalam surat itu diwacanakan Qahar akan dilantik sebagai Panglima Divisi IV TII jika bergabung dengan DI/TII. Mereka menekankan bahwa tuntutan pokok pemberontakan mereka adalah diakui dan diterima dalam jajaran TNI, bukan untuk mendirikan negara di dalam negara, di antaranya adalah Usman Ballo dan Hamid Ali (Haliadi, 1994). Namun, beberapa orang yang

bersetia pada Qahar, seperti Bahar Mattalioe, mendukung gagasan Qahar untuk bergabung dengan Kartosoewiryo sebab yakin hanya dengan mendasarkan perjuangan mereka pada Islam sajalah rakyat Sulawesi akan memberikan dukungan.

Maka diproklamirkanlah oleh pasukan Qahar bahwa wilayah Sulawesi menjadi bagian dari Negara Republik Islam Indonesia atau Darul Islam, pada tanggal 7 Agustus 1953. Pemilihan dasar ideologi baru untuk menarik simpati rakyat ini seharusnya dipandang dengan lebih kompleks karena cenderung condong ke arah politik praktis daripada ideologis.

Qahar dapat saja memilih ideologi komunis, sebab semasa revolusi ia pernah bekerja sebagai staf di Biro Perjuangan bentukan Amir Sjarifuddin dari PKI. Dalam pemberontakannya, ia bahkan dikontak oleh beberapa orang PKI di bawah D.N Aidit selaku pemimpin baru mereka. Tetapi pilihan Qahar tidak jatuh pada komunisme sebab PKI baru hendak bangkit dari kehancurannya pada tahun 1948 akibat pemberontakannya di Madiun.

Memilih Komunisme juga berbahaya sebab salah satu inti kekuatan pendukung Qahar adalah para bangsawan progresif. Ide-ide tentang penghapusan kelas jelas dapat melunturkan dukungan tersebut. Islam, berbeda dengan Komunisme, telah tumbuh dan berkembang di Sulawesi nyaris setengah milenium dan diserap oleh kebudayaan setempat sebagai landasan dalam bertindak-tanduk. Secara politis pula, organisasi yang paling mempunyai pengaruh di Sulawesi Selatan pada masa itu adalah Muhammadiyah. Mereka membuka banyak sekiloh dan tamatannya aktif di Masjumi yang juga mulai kuat di Sulawesi Selatan. Di tingkat nasional, Masjumi berseteru hebat dengan PKI. Masjumi juga memiliki tujuan untuk menerapkan syariat Islam di Indonesia bagi WNI beragama Islam.

Kondisi lain yang patut dipertimbangkan adalah cukup kuatnya sentimen anti Jawa di Sulawesi pada saat itu. hal ini disebabkan lantaran jabatan-jabatan penting seperti gubernur, komando militer, dan kepala polisi dipegang oleh orang Jawa.

Anggota militer pun banyak berasal dari Jawa, dan sayangnya mereka bukanlah orang-orang profesional sebab para prajurit itu ditengarai terlibat pemberontakan Madiun sehingga dikirim Markas Besar Angkatan Darat ke Sulawesi untuk melemahkan sisa-sisa pengaruh PKI dalam tubuh tentara di Jawa. Para prajurit ini pula sering bermasalah dengan rakyat setempat sebab tidak tahu adat bergaul Sulawesi yang sangat ketat, khususnya terhadap kaum perempuan.

Pernyataan afiliasi Qahar dengan Kartosoewiryo yang memuat pengangkatan Qahar sebagai Panglima Divisi IV TII jelas menunjukkan puncak ciri-ciri *megalothymia* sebagaimana telah disebut di muka dalam diri Qahar. Kita melihat, dalam perjuangan kelompok Qahar untuk diakui sebagai TNI Divisi Hasanuddin, ketimbang mencari kesetaraan untuk diakui ke dalam lembaga militer, ia dan kelompoknya merasa hanya pantas dipimpin oleh Qahar. Daripada hanya menjadi seorang pemimpin Batalyon atau staf biasa, nampaknya, menjadi Panglima Divisi IV TII adalah yang paling pantas untuk seorang pejuang seperti itu. Dari kondisi-kondisi itulah, dapat dikatakan bahwa Islam dipilih sebagai landasan pemberontakan lebih didasarkan atas kepentingan politik praktis dan bukan ideologi. Politik praktis semacam itu kemudian menghendaki suatu identitas untuk mengakomodir tujuan-tujuannya, dan Islam, adalah identitas yang dipilih oleh Qahar dan kelompoknya.

Mengendarai Identitas: Teror di Sulawesi Tenggara

Tidak lama setelah Qahar memproklamirkan gerakannya sebagai bagian dari DI/TII Kartosoewiryo di Jawa Barat, pasukan mereka di Sulawesi Tenggara yang dipimpin oleh Djufri Tambora. Ketika gerakan Qahar mulai berafiliasi dengan gerakan DI/TII Kartosoewiryo, Djufri Tambora langsung menjadi Komandan Brigade II DI/TII (Arsip Pemerintah Propinsi Sulawesi 1950-1960. No reg. 323.) di Sulawesi Tenggara yang membawahi empat batalyon antara lain: Batalyon I di Kendari, Batalyon II di Muna, Batalyon III di Kolaka, dan Batalyon IV di

Buton dan Kepulauan Tukang Besi (Gazaluddin, 1994: 41). Di Sulawesi Tenggara, gerakan mereka kerap diidentifikasi sebagai dengan sebutan 'gerombolan'.

Djufri Tambora adalah seorang yang telah memiliki pengalaman gerilya di Kolaka dan selama masa revolusi fisik turut menemani aktifitas Qahar Muzakkar di Jawa. Kedekatan mereka bukan tanpa alasan, Djufri dan Qahar sama-sama berasal dari siswa Muallimin Muhammadiyah Solo. Djufri juga bergabung dalam BKI bentukan Qahar setelah ia dibebaskan dari penjara Nusakambangan oleh Qahar, lalu ikut berlatih untuk kemudian menjadi pasukan inti Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi (TRIPS). Dalam perkembangan gerakan mereka di Sulawesi Tenggara, gerombolan membentuk suatu perhimpunan masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang secara terang-terangan menaruh simpati pada DI/TII. Himpunan masyarakat itu dinamai GRI atau Gerilya Rakyat Indonesia.

Mulanya, ide membentuk gerakan rakyat ini telah diterapkan di sekitar wilayah Kabaena tetapi kemudian diadopsi pula di Kepulauan Tiworo dan Pulau Muna. Tugas-tugas GRI antara lain ialah memata-matai rakyat yang berpihak pada Pemerintah Republik, menampung bahan makanan untuk gerombolan di bawah pimpinan Djufri dan Qahar (Laporan Polisi negara Kantor Wilayah Buton bagian Dinas Securiti) serta memasuki kampung-kampung untuk melakukan perampasan harta benda terhadap rakyat (Gazaluddin, 1994: 47).

Saat itu, warga Poleang mulai mendapat intimidasi ketika di Kampung Walasi, seorang guru jemaat menerima surat ancaman yang mengatakan agar guru tersebut selekas-lekasnya menanggalkan sifat 'kebelandaanya', sebab Indonesia terdiri dari 97% orang Islam. Jemaat Distrik Poleang Moronene juga mengalami intimidasi serupa. M. Soehoed, selaku Kepala Polisi Propinsi Sulawesi coba menenangkan masyarakat dengan mengatakan bahwa ancaman tersebut tidak jelas siapa pengirimnya dan tidak dilaksanakan.

Kecemasan itu agaknya dapat diredam hingga beberapa saat kemudian terjadi pembunuhan seorang Kepala Sekolah oleh gerombolan di Desa Ladongi –wilayah antara Kolaka dan Kendari, sebab pembunuhan itu ialah korban beragama Kristen. Pembunuhan kepala sekolah itu terjadi sepuluh hari setelah di Sulawesi Selatan Qahar memproklamkan gerakannya sebagai bagian dari Darul Islam Kartosuwiryo di Jawa Barat.

Di Kabaena sendiri, suatu wilayah terkenal sebagai lumbung beras utama di wilayah tersebut sejak masa gemilang Kesultanan Buton, yang mana warganya memeluk Islam sejak beberapa abad sebelumnya, kini dipaksa kembali berislam oleh kelompok pemberontak. pada 6 Januari 1953 Kantor Kepala Distrik Kabaena didatangi gerombolan, mengancam Acting Kepala Distrik, lalu merampok uang kas sejumlah Rp. 561.10. Maret 1953, berturut-turut pada tanggal 10 dan 11 bulan itu, dua desa di sebelah barat Kabaena, yakni Sikeli dan Batuawu dimasuki gerombolan. Di Batuawu, bersenjatakan Karabijn dan pistol, gerombolan itu memaksa rakyat untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.4.500 dan tiap orang mengumpulkan 50 liter beras.

12 Oktober 1953, Sikeli dan Batuawu lagi-lagi dimasuki gerombolan dari arah Poleang dengan anggota sebanyak tiga puluh enam orang. Sesampai di Sikeli mereka menggeledah perahu dan mengambil dagangan berupa kain seharga Rp.1.000 yang didatangkan dari Baubau. Pada hari itu juga, gerombolan menghukum dua orang yang dianggap melakukan zina (Laporan La Ode Ampo, Wakil Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Sulawesi Tenggara 1953). Kendati telah coba dicegah oleh Imam Distrik, gerombolan tetap menembaki kedua terduga zina itu di hadapan penduduk lalu memberikan ceramah agama dan meminta bantuan sebanyak Rp.2.000 dari rakyat dan Rp.700 dari koperasi. Meski warga telah memohon dan coba mempertahankan hartanya, gerombolan tidak peduli dan sebelum kembali ke arah Poleang sempat membakar empat rumah warga (Pengakuan Haji Daud pada Kepala Kampung Teomokole, 1953).

Dalam perjalanannya ke Poleang, imam distrik bernama Haji Daud yang sempat coba menghentikan eksekusi mati terhadap dua orang terduga zina tadi diikuti dalam rombongan. Imam ini dibawa ke daerah Bambaaja, suatu kampung di kaki Sulawesi Tenggara daratan. Di sana, gerombolan menggabungkan diri dengan kelompok Djufri Tambora yang berkekuatan dua ratus orang bersenjata lengkap. Oleh Djufri, Haji Daud diminta berkeliling kampung di seluruh distrik Rumbia dan Poleang untk memberi penerangan soal syahadat dan rukun Islam pada rakyat.

Hampir sebulan lamanya Haji Daud berkeliling dengan memanggul perintah dari Djufri sebelum akhirnya kembali ke Bambaaja. Ia tidak lagi mendapati tanda-tanda masih adanya gerombolan sesampainya di Bambaaja, maka seketika itu juga Haji Daud segera melarikan diri kembali ke Kabaena. Haji Daud tidak berada lama di Kabaena, ia segera menuju Baubau sebab di Kabaena ia dikenali oleh seorang anggota gerombolan bernama La Untu (Laporan M.Saleh, 1953). Dalam laporan Wakil Kepala Distrik Kabaena, dalam kemunculannya La Untu membawa serta beberapa barang yang sebelumnya sempat dirampok oleh gerombolan. Dalam pada itu, ia juga menyatakan telah menjadi seorang komandan pemimpin gerombolan di Kabaena.

Rawannya wilayah Kabaena jelas terlihat dari betapa seringnya wilayah ini didatangi gerombolan sampai paruh kedua tahun 1954. Seturut dengan itu, keresahan warga juga kian mencapai titik puncaknya. Memasuki Agustus, nama Haji Patombong mulai dikenal sebagai salah satu pimpinan gerombolan di Kabaena Barat. Dalam gerakannya, Haji Patombong selalu mengincar dan menghabisi pimpinan-pimpinan kampung yang pro terhadap Pemerintah Republik. Olehnya, warga Batuawu membentuk suatu gerakan bernama Gerilya Penjaga Keselamatan Diri Sendiri. Orang-orang Batuawu merasa terjebak oleh situasi sebab jika berpihak pada gerombolan mereka akan dihabisi oleh pasukan Republik, begitu pula sebaliknya jika mereka berpihak pada

Republik maka pasukan gerombolanlah yang akan menangkap mereka. Lebih jauh, Kepala Kampung Batuawu mengatakan bahwa dalam situasi itu rakyat telah kehilangan kepercayaan di antara mereka sendiri dan berada pada posisi siap saling membunuh satu sama lain.

Wibawa Pemerintah Republik di wilayah Kabaena makin lemah. Hal ini ditandai dengan makin aktifnya gerombolan memungut pajak dari warga dan menghukum sesiapa yang tidak bersepakat dengan ideologi TII. Di wilayah Kampung Todubara, lahir suatu kampung militer TII dengan struktur pemerintahan sendiri dan hukum TII sebagai hukum yang sah. Siaran-siaran kilat dari gerombolan soal pentingnya ‘menghapuskan’ orang-orang yang enggan bertobat pada tuhan marak tersebar. Gerombolan juga menciptakan suatu hukum berkaitan dengan kawin-cerai.

Seturut dengan itu, gerak gerombolan makin ke arah Timur. Imam Distrik Kabaena Timur bernama Nuhung menjadi salah satu orang yang dicari oleh kelompok di bawah pimpinan Djufri. 29 Oktober 1954, gerombolan berjumlah tiga puluh tiga orang yang langsung dibawahhi Djufri muncul di Kampung Tangkeno Distrik Kabaena Timur. Mereka mencari Nuhung, Abdul Muis, dan Abdul Gani selaku Kampung Enano sebab orang-orang inilah yang kerap kali membocorkan informasi soal gerombolan pada pemerintah Republik.

Djufri mengingatkan agar orang-orang ini untuk memihak pada mereka atau sekalian tidak muncul jika menolak sebab akan langsung dibunuh. Saat itu pula, Djufri meminta sokongan sebanyak Rp.2.000 pada warga. Setelahnya, megerombolan meninggalkan Tangkeno dan menuju Talaga bergabung dengan anggota lain mereka di sana.

Nuhung yang waktu itu telah mengungsikan dirinya ke bawah kaki Gunung Sabangpolulu, tujuh kilometer dari kampung Tangkeno, mengirimkan sebuah laporan pada Kepala KUAK Sulawesi Tenggara yang merinci kegiatan gerombolan di Kabaena. Pada tiap-tiap kampung gerombolan meminta uang sokongan sebesar Rp.3.000 sampai Rp.4.000 atau serendah-rendahnya Rp.500

serta mengambil barang-barang berupa kain juga hewan ternak seperti sapi dan kuda untuk dibawa ke Poleang. Laporan ini membenarkan pula informasi bahwa di Kabaena telah terbentuk kampung-kampung TII, di mana setiap warga diwajibkan membayar Rp.5 setiap bulannya.

Dalam suratnya yang lain, Nuhung mengaku bahwa pada 6 November 1954, gerombolan telah mengepung pasar Toli-Toli dan mendapati Kepala Kampung Enano, Abdul gani, yang selama ini telah menjadi incaran mereka. Abdul Gani ditanyai sebab ia membocorkan gerak gerombolan pada pemerintah Republik. Mulanya, Abdul Gani coba mendelik dan mengaku tidak pernah berhubungan dengan Pemerintah Republik untuk melaporkan aktifitas gerombolan. Kendati demikian, Kepala kampung Enano akhirnya mesti mengaku juga setelah padanya diperlihatkan salinan laporan yang ia tandatangani. Gerombolan menembak Abdul Gani saat itu juga.

Berakhirnya Teror

Teror ini baru mulai melemah dan berangsur-angsur mereda sejak dikeluarkannya dekrit presiden 5 Julis 1959. Dekrit itu mempengaruhi kekuatan gerombolan di Sulawesi Tenggara yang baru saja selesai melaksanakan Konferensi Pupir (Pertemuan Urgentie Pejuang Islam Revolusioner). Dalam konferensi tersebut, Qahar Muzakkar membentuk pasukan MOMOC Ansharullah dan mengangkat Djufri Tambora, sebagai pimpinan Organisasi Revolusi Islam Indonesia dan Panglima Perang Angkatan Perang Republik Islam Indonesia. selain itu juga mengangkat K.H Abdul Rahman Ambo Dalle dan Abdul Kaso Gani, yang masing-masing sebagai Menteri Pertahanan RII dalam Panglima Perang APNR II dan Perwakilan Kabinet Presden RII (Gazaluddin, 1994: 76).

Sesungguhnya pengangkatan Djufri Tambora, Abdul Rahman Ambo Dalle, dan Abdul Kaso Gani menimbulkan kecemburuan di dalam tubuh gerombolan sendiri. Andi Bahar Mattaliu dan Machmud Lantana yang juga menginginkan posisi tersebut pada akhirnya memutuskan untuk menyerah pada

Republik sebab kecewa terhadap keputusan Qahar sembari mempertimbangkan keadaan. Pemerintah Republik makin meningkatkan operasi militernya di bawah KODAM XIV Hasanuddin, seturut dengan itu Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 juli masih membuka kesempatan bagi mereka untuk mengakhiri petualangannya.

Menyerahnya Bahar Mattaliu dan Machmud Lantana membawa kerugian pada gerakan mereka berupa, 474 orang pasukan, 79 anggota staf TII, 159 pucuk senjata, 8 pucuk brengun, sepucuk Mitralleur 12,5, sepucuk watermantel, 4 pucuk mortir '2', dan rakyat yang dipaksa lari ke kota sebanyak 1460 orang. Pada tahun 1959, seorang pimpinan gerombolan bernama Andi bachtiar juga menyerah bersama 800 orang pengikutnya kepada pemerintah setempat dan mendarat di Tampo, Muna Utara untuk selanjutnya menyerahkan diri pada kepolisian di Muna dan menunggu proses penyelesaian. Penyerahan ini tidak terlepas dari pengaruh Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang masih memberikan kesempatan pada pemberontak untuk menyerahkan diri (Gazaluddin, 1994: 72-73).

PENUTUP

Akar politik identitas dapat ditelusuri dari tawaran filosofis dan teoritik Francis Fukuyama. Ia menyatakan bahwa ada bagian dari jiwa manusia yang menuntut pengenalan dan pengakuan. Bagian jiwa itu disebut *Thymos*. *Thymos* menuntut perlakuan setara dalam masyarakat, atau adalah *isothymia*. Namun, ketika *thymos* seseorang diabaikan, pencarian akan kondisi *isothymia* dapat dengan mudah tergelincir kepada sifat *megalothymia*, keadaan di mana seseorang memandang dirinya sebagai superior dan menghendaki masyarakat sekitar memandangnya demikian.

Qahar menuntut *isothymia* atas *thymos*-nya, namun tergelincir pada sifat-sifat *megalothymia*. Mulai dari sangsi hukum *Ripaoppangi tanah* di Luwu, hingga secara berkala ia kehilangan jabatan dan posisinya di lembaga militer. Tentu, peran dan jasa Qahar bersama kelompoknya selama masa revolusi, tak dapat dinihilkan. Bagaimanapun, ia adalah salah satu tokoh penting yang telah dengan

gigih menjaga ritme perjuangan di Sulawesi. Kendati demikian posisi TNI ketika menolak tuntutan Qahar dan KGSS-nya untuk diakui sebagai satu kesatuan dengan sosok Qahar sebagai komandan, haruslah dinilai dengan cermat.

Sifat *megalothymia* Qahar dicerminkan dalam pertimbangan praktisnya memilih Islam sebagai dasar melawan RI. *Megalothymia* juga tidak sekedar nampak pada Qahar, keretakan solidaritas anggota-anggotanya pasca pengangkatan Djufri Tambora sebagai pimpinan Organisasi Revolusi Islam Indonesia dan Panglima Perang Angkatan Perang Republik Islam Indonesia juga menunjukkan kecenderungan serupa dalam diri pengikut-pengikutnya.

Demi memenuhi tujuan politik mereka, Islam digunakan untuk menarik simpati rakyat dengan cara-cara kontradiktif: menggunakan ulama untuk memberikan ceramah agama yang disertai dengan teror seperti pembunuhan, pembakaran, penculikan, dan sebagainya. Semua itu dianggap halal sebab telah dibalutkan dengan doktrin bahwa teror itu dilakukan dalam rangka menjalankan perintah Tuhan. Di hadapan politik identitas, agama yang sesungguhnya turun sebagai rahmat bagi semesta diubah wajahnya menjadi beringas, penuh teror, dan seolah-olah haus darah. Teror ini berangsur-angsur berakhir dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang masih memberikan kesempatan pada pemberontak untuk menyerahkan diri. Kebijakan itu diiringi operasi penumpasan KODAM XIV Hasanuddin yang makin masif, serta besarnya perpecahan dalam kelompok Qahar sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai penutup tulisan ini, saya hendak mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang telah mendukung penulisan ini. Untuk Dr. Suriadi Mappangara dan Prof. Abd. Rasyid Asba yang telah membimbing penulis dalam tema terkait sebagai bahan skripsi ketika hendak meraih gelar sarjana di Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin. Untuk itu pula, tiada lupa penulis

haturkan terima kasih pada dekanat Fakultas Ilmu Budaya dan Ketua Departemen Ilmu Sejarah Universitas Hasanuddin. Terima kasih pula kepada saudara-saudara saya di UKMMenulis KMFIB-UH yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir mendiskusikan kerangka pemikiran Francis Fukuyama yang menjadi pendekatan cara pandang dalam tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip:

- Arsip Prov. Sulawesi 1950-1960, nomor registrasi 275.
Arsip Prov. Sulawesi 1950-1960. No reg. 323.
Arsip Prov. Sulawesi 1950-1960, nomor registrasi 330.

Buku:

- C. Ricklefs, M. 1991. *Sejarah Indonesia Modern*, terjemahan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Fukuyama, Francis. 2018. *Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
Gonggong, Anhar. 1992. *Abdul Qahhar Mudzakkar, dari Patriot hingga Pemberontak*. Jakarta: PT Grasindo.
H. Dengel, Holk. 1986. *Darul Islam dan Kartosuwiryo: Langkah Perwujudan Angan-Angan yang Gagal*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Husain Pontoh, Coen. 2005. *Menentang Mitos Tentara Rakyat*, Yogyakarta: Resistbook.
JARAH DAM XIV/HASANUDDIN. 1982. 25 *Tahun Kodam XIV Hasanuddin 1957 – 1982*, tanpa penerbit.
Kartodirjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
MCTurnan Kahin, George. 2013. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.
Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan. Lembaga Penelitian Unhas, tanpa nama penulis dan tahun terbit.

- Sen, Amartya. 2016. *Kekerasan dan Identitas (terj.)*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Sillars Harvey, Barbara. 1989. *Pemberontakan Qahar Muzakkar: dari Tradisi ke DI/TII (Terj.)*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sundhaussen, Ulf. 1986. *Politik Militer Indonesia 1945 – 1967: Menuju Dwifungsi ABRI*, Jakarta: LP3ES.
- van Bemmelen, Sita, Raben, Remco (Penyunting). 2011. *Antara Daerah dan Negara: Indonesia Tahun 1950-an. Pembongkaran Narasi Besar Integrasi Bangsa*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, KITLV-Jakarta.

Skripsi:

- Gazaluddin. 1994. Gerakan DI/TII di Muna dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat 1953-1959. (Skripsi S1 pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin).
- Karimul Khair, Fathul. 2019. Gerombolan di Sulawesi Tenggara 1950 – 1959: Suatu Keresahan Sosial. (Skripsi S1 pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin).
- Sadi, Haliadi. 1994. Gerakan Bandit Sosial di Sidenreng Rappang 1953-1955, Sebuah Studi Kasus Terhadap Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di Sulawesi Selatan. (Skripsi S1 pada Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin).